



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP  
DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menyatakan wabah virus *Corona* yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional, sehingga Pemerintah perlu mengambil langkah perlindungan bagi kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran virus *Corona* ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mengambil langkah perlindungan dan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya dalam bidang perdagangan internasional, pada tanggal 3 Februari 2020 di Jakarta, Pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Bidang Perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud

dalam huruf b dan sebagai bentuk perlindungan kesehatan manusia dan hewan sesuai dengan *Article XX General Agreement on Tariffs and Trade 1994 World Trade Organization*, perlu mengatur larangan sementara impor binatang hidup dari Republik Rakyat Tiongkok;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan

Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Binatang adalah hewan atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Importir dilarang mengimpor Binatang hidup yang:
  - a. berasal dari Republik Rakyat Tiongkok; atau
  - b. transit di Republik Rakyat Tiongkok,ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) Importir wajib mengekspor kembali ke negara asal atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Binatang hidup yang dilarang untuk diimpor, yang tiba di pelabuhan Indonesia pada saat Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Waktu ketibaan Binatang hidup di pelabuhan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanggal pengajuan dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka Impor.
- (4) Dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas BC 1.1, BC 2.0, BC 2.1, BC 2.2, BC 2.3, BC 1.6, PPFTZ-01, atau *Consignment Note*.

### Pasal 4

Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggung jawab Importir.

### Pasal 5

Importir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

## LAMPIRAN

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP  
DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGGOKJENIS BINATANG HIDUP YANG DILARANG SEMENTARA IMPORNYA  
DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK

No	Pos Tarif	Uraian Barang	Keterangan
	<b>01.01</b>	<b>Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.</b>	
		- Kuda :	
1	0101.21.00	- - Bibit	
2	0101.29.00	- - Lain-lain	
	0101.30	- Keledai :	
3	0101.30.10	- - Bibit	
4	0101.30.90	- - Lain-lain	
5	0101.90.00	- Lain-lain	
	<b>01.02</b>	<b>Binatang hidup jenis lembu.</b>	
		- Sapi :	
6	0102.21.00	- - Bibit	
	0102.29	- - Lain-lain :	
		- - - Sapi jantan :	
7	0102.29.11	- - - - Oxen	
8	0102.29.19	- - - - Lain-lain	
9	0102.29.90	- - - Lain-lain	
		- Kerbau :	
10	0102.31.00	- - Bibit	
11	0102.39.00	- - Lain-lain	
	0102.90	- Lain-lain :	
12	0102.90.10	- - Bibit	
13	0102.90.90	- - Lain-lain	
	<b>01.03</b>	<b>Babi hidup.</b>	
14	0103.10.00	- Bibit	
		- Lain-lain :	
15	0103.91.00	- - Berat kurang dari 50 kg	
16	0103.92.00	- - Berat 50 kg atau lebih	
	<b>01.04</b>	<b>Biri-biri dan kambing, hidup.</b>	
	0104.10	- Biri-biri :	
17	0104.10.10	- - Bibit	
18	0104.10.90	- - Lain-lain	
	0104.20	- Kambing :	
19	0104.20.10	- - Bibit	
20	0104.20.90	- - Lain-lain	

	<b>01.05</b>	<b>Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.</b>	
		- Berat tidak lebih dari 185 g :	
	0105.11	- - Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
21	0105.11.10	- - - Ayam bibit	
22	0105.11.90	- - - Lain-lain	
	0105.12	- - Kalkun :	
23	0105.12.10	- - - Kalkun bibit	
24	0105.12.90	- - - Lain-lain	
	0105.13	- - Bebek :	
25	0105.13.10	- - - Bebek bibit	
26	0105.13.90	- - - Lain-lain	
	0105.14	- - Angsa :	
27	0105.14.10	- - - Angsa bibit	
28	0105.14.90	- - - Lain-lain	
	0105.15	- - Ayam guinea :	
29	0105.15.10	- - - Ayam guinea bibit	
30	0105.15.90	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
	0105.94	- - Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
31	0105.94.10	- - - Ayam bibit, selain ayam sabung	
		- - - Ayam sabung :	
32	0105.94.41	- - - - Berat tidak lebih dari 2 kg	
33	0105.94.49	- - - - Lain-lain	
		- - - Lain-lain :	
34	0105.94.91	- - - - Berat tidak lebih dari 2 kg	
35	0105.94.99	- - - - Lain-lain	
	0105.99	- - Lain-lain :	
36	0105.99.10	- - - Bebek bibit	
37	0105.99.20	- - - Bebek lainnya	
38	0105.99.30	- - - Angsa, kalkun dan ayam guinea, bibit	
39	0105.99.40	- - - Angsa, kalkun dan ayam guinea lainnya	
	<b>01.06</b>	<b>Binatang hidup lainnya.</b>	
		- Binatang menyusui :	
40	0106.11.00	- - Primata	
41	0106.12.00	- - Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo <i>Cetacea</i> ); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo <i>Sirenia</i> ); anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo <i>Pinnipedia</i> )	
42	0106.13.00	- - Unta dan camelid lainnya ( <i>Camelidae</i> )	
43	0106.14.00	- - Kelinci dan hare	

44	0106.19.00	- - Lain-lain	
45	0106.20.00	- Binatang melata (termasuk ular dan penyu)	
		- Burung :	
46	0106.31.00	- - Burung pemangsa	
47	0106.32.00	- - Psittaciformes (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua)	
48	0106.33.00	- - Burung unta; emu ( <i>Dromaius novaehollandiae</i> )	
49	0106.39.00	- - Lain-lain	
		- Serangga :	
50	0106.41.00	- - Lebah	
51	0106.49.00	- - Lain-lain	
52	0106.90.00	- Lain-lain	
	<b>95.08</b>	<b>Komedi putar, ayunan, galeri tembak dan permainan taman hiburan lainnya; sirkus keliling dan travelling menagerie; teater keliling.</b>	
53	Ex. 9508.10.00	- Sirkus keliling dan travelling menagerie	Binatang Sirkus keliling dan travelling menagerie

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI